

Analisis Potret Ekonomi Publik Indonesia Meliputi Tanaman Palawija, Perkebunan, Kehutanan, Perternakan Dan Perikanan

Tina Safira

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

tinasafira14@gmail.com

Mohamat Masrur Mauridhoh

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

mohmasrurm@gmail.com

Muhammad Yasin

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

yasin@untag-sby.ac.id

Alamat: Jl. Semolowaru No. 45, Menur Pumpungan, Lec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur
60118

Korespondensi penulis: tinasafira14@email.com

Abstract

This research aims to analyze the portrait of the Indonesian public economy with a focus on the secondary crops, plantations, forestry, livestock and fisheries sectors. This study uses a descriptive analytical approach to identify the contribution of each sector to the national economy, the challenges faced, and the potential for future development. Data was obtained from various national statistical sources, government reports, and relevant academic literature. The results of the analysis show that these sectors have an important role in providing employment opportunities, increasing regional income, and contributing to national GDP. Secondary crops and plantations, for example, show high potential for economic diversification and food security. The forestry sector, despite facing the challenges of deforestation and climate change, remains significant in providing industrial raw materials and environmental conservation. Livestock and fisheries also play an important role in meeting people's protein needs and supporting food security. However, these various sectors face challenges such as lack of infrastructure, limited market access, and policies that are not yet optimal. This study suggests the need for a more integrated and sustainable development strategy to maximize the contribution of these sectors to the Indonesian economy.

Keywords: *public economy, secondary crops, plantations, forestry, animal husbandry, fisheries, Indonesia.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potret ekonomi publik Indonesia dengan fokus pada sektor tanaman palawija, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk mengidentifikasi kontribusi masing-masing sektor terhadap perekonomian nasional, tantangan yang dihadapi, serta potensi pengembangan di masa depan. Data diperoleh dari berbagai sumber statistik nasional, laporan pemerintah, serta literatur akademik yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor-sektor ini memiliki peran penting dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, dan kontribusi terhadap PDB nasional. Tanaman palawija dan perkebunan, misalnya, menunjukkan potensi tinggi dalam diversifikasi ekonomi dan ketahanan pangan. Sektor kehutanan, meskipun menghadapi tantangan deforestasi dan perubahan iklim, tetap signifikan dalam penyediaan bahan baku industri dan konservasi lingkungan. Peternakan dan perikanan juga berperan penting dalam memenuhi kebutuhan protein masyarakat dan mendukung ketahanan pangan. Namun, berbagai sektor ini menghadapi tantangan seperti kurangnya infrastruktur, akses pasar yang terbatas, serta kebijakan yang belum optimal. Studi ini menyarankan perlunya strategi pengembangan yang lebih

terintegrasi dan berkelanjutan untuk memaksimalkan kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap perekonomian Indonesia.

Kata Kunci: ekonomi publik, tanaman palawija, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, Indonesia.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ekonomi publik merupakan cabang ilmu ekonomi yang menganalisis terkait peranan pemerintah dalam perekonomian, dan juga dampak kebijakan pemerintah terhadap suatu perekonomian. Masalah ekonomi publik Indonesia terdiri dari kebijakan publik, pengelolaan pelayanan publik dan peranan pemerintah dalam ekonomi publik. Potret ekonomi publik sendiri yaitu suatu konsep yang mempelajari tentang peranan pemerintah/negara dalam kehidupan ekonomi, dengan fokus pada pengeluaran dan penerimaan negara. Dalam konteks ini, ilmu ekonomi publik berhubungan erat dengan ilmu hukum, politik dan sosial lainnya, serta membahas masalah keuangan negara, seperti pengeluaran, penerimaan, hutang, dan pinjaman pemerintah.

Bedasarkan penelitian Indonesia sebagai negara berkembang memiliki tantangan dalam mengelola ekonomi masyarakat. Perubahan kebijakan publik yang disertai dengan adanya tuntutan demokratis menjadi fenomena global, yang menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara.

Dengan terus menjaga agar negara terus berkembang pemerintah membuat kebijakan ekonomi publik meliputi tanaman palawija, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan yang memiliki keunggulan dan peran penting untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dengan memberlakukan peraturan – peraturan agar sub sektor tersebut terus dikelola dan memiliki manfaat bagi masyarakat seperti ketahanan pangan, lapangan pekerjaan bagi masyarakat, peningkatan devisa dan PDB negara Indonesia, dll.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran tanaman palawija, perkebunan, kehutanan peternakan dan perikanan dalam perekonomian Indonesia?
2. Apa saja keunggulan tanaman palawija, perkebunan, kehutanan peternakan dan perikanan dalam perekonomian Indonesia?

3. Bagaimana kebijakan public yang meliputi tanaman palawija, perkebunan, kehutanan peternakan dan perikanan?

1.3. Tujuan

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana peran tanaman palawija, perkebunan, kehutanan peternakan dan perikanan dalam perekonomian Indonesia
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana kebijakan public yang meliputi tanaman palawija, perkebunan, kehutanan peternakan dan perikanan
3. Untuk mengetahui dan memahami apa saja factor yang menjadikan kebijakan tanaman palawija, perkebunan, kehutanan peternakan dan perikanan

PEMBAHASAN

2.1. Peran Sub Sektor Tanaman Palawija, Perkebunan, Kehutanan Peternakan dan Perikanan dalam Perekonomian Indonesia

Berikut beberapa peran sub sektor tanaman palawija, perkebunan, kehutanan peternakan dan perikanan dalam perekonomian indonesia

- Sub sektor tanaman palawija

Sub sektor tanaman palawija memiliki peran yang cukup penting dalam penyediaan kebutuhan pangan di Indonesia, tanaman palawija meliputi jagung, kacang hijau, kacang tanah, kedelai, ubi jalar, ubi kayu. Tanaman palawija memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan karena kecendrungan umum menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga daerah berbasis non-padi lebih tinggi, stabil, dan berkelanjutan dibandingkan dengan pendapatan rumah tangga pada daerah tradisional berbasis usahatani padi. Selain itu tanaman palawija dapat digunakan sebagai tanaman pangan pengganti beras sebagai salah satu kegiatan diversifikasi 2 pangan.

- Sub sektor perkebunan

Sub sektor perkebunan merupakan salah satu andalan bagi pendapatan nasional, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku dalam negeri dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta devisa negara

Indonesia. kegiatan perkebunan berperan dalam pengembangan wilayah dan mengembangkan ekonomi kerakyatan. Termasuk mendukung pengembangan energy baru terbarukan serta menurunkan emisi rumah kaca.

- Sub sektor kehutanan

Sub sektor kehutanan mendukung sebagian besar perekonomian Indonesia melalui pemerolehan devisa, menyediakan bahan baku untuk industri kain, mengembangkan wilayah, penyediaan lapangan kerja untuk masyarakat, dan sebagainya. Untuk menompang peran ini sektor kehutanan perlu terus meningkatkan kualitas tetap dapat menyediakan hasil yang berkualitas.

- Sub sektor peternakan

Sub sektor peternakan mempunyai peranan penting dalam menciptakan bangsa yang sejahtera dalam bidang perekonomian dan ketahanan pangan. Kebutuhan pangan dapat terpenuhi salah satunya dengan hasil ternak. Di Indonesia, hasil ternak menjadi dasar kebutuhan pangan dapat tercukupi secara mandiri. peternakan memegang peranan penting dalam penyediaan sumber pangan, sekitar 60% dari sumber pangan di Indonesia diberikan oleh subsektor peternakan

- Sub sektor Perikanan

Sub sektor Perikanan di Indonesia memiliki peran strategis, namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari kompleksitasnya permasalahan yang dihadapi. Ancaman terhadap kelangsungan sumber daya ikan dan posisi pelaku usaha menjadi perhatian utama dalam mewujudkan perikanan tangkap berkelanjutan. Sektor perikanan juga memiliki potensi tinggi untuk membantu meningkatkan perekonomian Indonesia, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.2. keunggulan tanaman palawija, perkebunan, kehutanan peternakan dan perikanan

dalam perekonomian Indonesia

- **Keunggulan tanaman palawija**

1. Diversifikasi pangan tanaman palawija membantu dalam diversifikasi pangan di Indonesia.

2. Kontribusi terhadap ketahanan pangan tanaman palawija memberikan kontribusi penting terhadap ketahanan pangan Indonesia.
3. Peningkatan Pendapatan Petani Tanaman palawija juga memberikan potensi peningkatan pendapatan bagi petani di Indonesia.
4. Mendukung Industri Pangan Produksi tanaman palawija juga mendukung industri pangan di Indonesia.
5. Mendukung Industri Pangan Produksi tanaman palawija juga mendukung industri pangan di Indonesia.

- **Keunggulan perkebunan**

Berikut adalah beberapa keunggulan perkebunan dalam perekonomian Indonesia:

1. Kontribusi terhadap PDB Perkebunan,
2. Pencipta Lapangan Kerja Perkebunan juga menjadi salah satu sektor yang menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.
3. Ekspor Komoditas Unggulan Produk-produk perkebunan Indonesia seperti kelapa sawit, karet, teh, kopi, dan kakao memiliki pangsa pasar yang besar di pasar internasional.
4. Diversifikasi Pendapatan Petani Perkebunan membantu diversifikasi pendapatan petani di Indonesia.
5. Pengembangan Infrastruktur Kehadiran juga mendorong pengembangan infrastruktur di daerah sekitarnya.
6. Penyediaan Bahan Baku Industri Komoditas perkebunan seperti kelapa sawit dan karet menjadi bahan baku penting bagi industri hilir di Indonesia.

- **Keunggulan kehutanan**

Beberapa keunggulan kehutanan sebagai berikut :

1. Kontribusi pada pertumbuhan ekonomi
2. Berperan penting dalam tingkatkan perekonomian
3. Sumberdaya hutan sangat penting dalam mendorong tersedianya lapangan kerja
4. Kehutanan sebagai penghasil devisa

- **Keunggulan peternakan**

Berikut adalah beberapa keunggulan peternakan dalam perekonomian Indonesia:

1. Peternakan memiliki keunggulan mengurangi kebutuhan pangan nasional dan mengurangi impor pangan.
2. Sektor peternakan mempunyai keunggulan dalam mewujudkan bangsa yang sejahtera dalam bidang perekonomian.
3. Sektor peternakan mempunyai keunggulan dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional.
4. Peternakan dapat memberikan pendapatan yang cukup bagi para peternak, sekaligus menjadi sumber bahan pangan bagi masyarakat.

- **Keunggulan perikanan**

1. pengentasan kemiskinan di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan. Banyak nelayan skala kecil dan petani ikan yang menggantungkan mata pencahariannya pada sektor ini.
2. Sektor perikanan Indonesia memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perolehan devisa negara.
3. Perikanan merupakan sumber protein hewani yang vital bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir

3.3. kebijakan public yang meliputi tanaman palawija, perkebunan, kehutanan peternakan dan perikanan

- **Kebijakan sub sektor tanaman palawija**

Berikut ini beberapa aspek kebijakan tanaman palawija dalam perekonomian Indonesia:

1. Dukungan Pemerintah Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan tanaman palawija. Ini termasuk program-program seperti subsidi pupuk, penyediaan benih unggul, bantuan teknis, dan insentif lainnya untuk mendorong petani dalam menanam palawija.
2. Penyuluhan dan Pelatihan Selain dukungan finansial, pemerintah juga memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada petani terkait praktik pertanian yang baik untuk tanaman palawija. Hal ini bertujuan untuk

meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani.

3. Pengembangan Pasar Kebijakan terkait pengembangan pasar juga penting dalam mendukung ekonomi tanaman palawija di Indonesia. Pemerintah berupaya memperluas akses pasar bagi petani palawija, baik pasar lokal maupun internasional, sehingga mereka dapat menjual hasil panen dengan harga yang kompetitif.
4. Penelitian dan Inovasi Investasi dalam penelitian dan inovasi juga merupakan bagian penting dari kebijakan tanaman palawija di Indonesia. Melalui penelitian yang berkelanjutan, petani dapat mengakses varietas tanaman yang lebih unggul, teknologi pertanian modern, dan praktik-praktik terbaik untuk meningkatkan hasil panen.

- **Kebijakan sub sektor perkebunan**

Kebijakan Pemerintah terkait Perkebunan Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengatur sektor perkebunan guna meningkatkan produktivitas, kesejahteraan petani, dan keberlanjutan lingkungan. Beberapa kebijakan yang diterapkan antara lain program replanting, sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan (RSPO), dan perlindungan lahan perkebunan.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa kebijakan untuk mengembangkan sektor perkebunan. Salah satunya adalah Program Nasional Perkebunan (PNP) yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing perkebunan nasional. Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan hilirisasi dan diversifikasi produk perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani.

- **Kebijakan sub sektor kehutanan**

Kebijakan :

1. Moratorium Hutan

Pada tahun 2011, Indonesia menerapkan moratorium dua tahun terhadap konsesi penebangan baru dan pengembangan lahan gambut untuk mengurangi laju deforestasi. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi hutan primer dan

lahan gambut, yang penting bagi konservasi keanekaragaman hayati dan penyerapan karbon.

2. Sertifikasi Hutan

Pemerintah Indonesia telah mendorong skema sertifikasi hutan seperti Forest Stewardship Council (FSC) untuk memastikan praktik pengelolaan hutan berkelanjutan. Sertifikasi membantu meningkatkan akses pasar produk kayu Indonesia dengan menunjukkan legalitas dan keberlanjutannya.

3. Program Perhutanan Sosial

Indonesia telah memperkenalkan berbagai program perhutanan sosial untuk memberdayakan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan. Program-program ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan mendorong upaya konservasi di tingkat akar rumput.

4. Inisiatif REDD+

Indonesia secara aktif terlibat dalam program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+), yang memberikan insentif kepada negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan. Melalui REDD+, Indonesia bertujuan untuk melestarikan hutannya sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan.

5. Moratorium Kelapa Sawit

Menanggapi kekhawatiran mengenai deforestasi terkait perkebunan kelapa sawit, Indonesia menetapkan moratorium konsesi kelapa sawit baru di hutan primer dan lahan gambut. Kebijakan ini berupaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dengan mendorong praktik produksi minyak sawit berkelanjutan.

• **Kebijakan sub sektor peternakan**

Beberapa kebijakan sub sektor peternakan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah

Pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa kebijakan dan peraturan untuk mendukung pengembangan peternakan unggas di dalam negeri. Kementerian Pertanian bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan-kebijakan ini dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut bermanfaat

bagi petani dan konsumen. Pemerintah juga telah membentuk beberapa lembaga untuk mendukung industri perunggasan, antara lain Asosiasi Peternak Unggas Indonesia (API) dan Asosiasi Perusahaan Unggas Indonesia (ADI)

2. Peraturan Impor dan Ekspor

Pemerintah Indonesia mengatur secara ketat impor dan ekspor produk unggas untuk menjamin keamanan dan kualitas produk tersebut. Pemerintah telah menerapkan beberapa langkah untuk melindungi peternak unggas lokal dari persaingan asing, termasuk tarif tinggi terhadap produk unggas impor. Namun pemerintah juga mendorong ekspor produk unggas, khususnya ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

3. Subsidi dan Bantuan Keuangan

Pemerintah Indonesia memberikan subsidi dan bantuan keuangan kepada peternak unggas untuk membantu mereka meningkatkan produktivitas dan daya saing. Subsidi ini mencakup dukungan harga bahan pakan, akses terhadap pinjaman berbunga rendah, dan pendanaan untuk program penelitian dan pengembangan. Pemerintah juga menyediakan program pelatihan dan pendidikan untuk membantu petani meningkatkan praktik pertanian mereka dan mengadopsi teknologi baru.

4. Pembangunan infrastruktur

Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya pembangunan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan industri perunggasan. Pemerintah telah berinvestasi dalam perbaikan jalan pedesaan, sistem irigasi, dan pasokan listrik untuk mendukung kegiatan peternakan unggas. Pemerintah juga memberikan insentif bagi investasi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah yang belum terlayani oleh infrastruktur yang ada.

5. Penelitian dan Pengembangan

Pemerintah Indonesia mendukung program penelitian dan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan peternakan unggas. Pemerintah telah membentuk beberapa lembaga penelitian, termasuk Balai Penelitian Unggas Indonesia (IPRI), untuk melakukan penelitian di berbagai aspek peternakan unggas, termasuk pembibitan, nutrisi, pengendalian penyakit, dan pengelolaan lingkungan. Program penelitian ini dirancang untuk

membantu petani mengadopsi teknologi dan praktik baru yang dapat meningkatkan produktivitas mereka dan mengurangi dampak lingkungan.

- **Kebijakan sub sektor perikanan**

Menteri kelautan republic Indonesia cabinet kerja jokowi-jk dalam waktu sekitar 3 bulan kerja telah mengeluarkan lima peraturan terkait dengan upaya memperbaiki kinerja usaha perikanan nasional dan kelestarian sumber daya ikan di perairan Indonesia. Peraturan – peraturan yang telah ditetapkan tersebut adalah :

1. Permen KP No.56 Tahun 2014 tentang penghentian sementara (moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap di WPP RI.
2. Permen KP No.57 Tahun 2014 tentang usaha perikanan tangkap di WPP RI.
3. Permen KP No.1 Tahun 2015 tentang penangkapan lobster, kepiting dan rajungan.
4. Permen KP No.2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat Tarik di WPP RI.
5. Permen KP No 4 Tahun 2015 tentang larangan penangkapan ikan di WPP R1 714.

Dengan lima peraturan diatas tersebut merupakan suatu langkah cepat yang perlu diapresiasi dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan di sektor perikanan. Dalam jangka panjang diyakini bahwa kebijakan – kebijakan menteri perikanan tersebut akan sangat berdampak positif bagi berkelanjutan sumber daya ikan dan usaha perikanan di Indonesia sepanjang diimplementasikan secara benar. Selain itu juga dengan diberhentikannya aktivitas alih muatan ikan di tengah laut diharapkan dapat menekan kegiatan yang kerap terjadi di perairan Indonesia.

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan materi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa potret ekonomi public indonesia meliputi tanaman palawiaj, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia melalui kebijakan pemerintah yang diberlakukan pada sektor tersebut. Dengan adanya tentang analisis ini dapat mengetahui dan

memahami peran, keunggulan dan kebijakan public yang diberlakukan oleh pemerintah terhadap sub sektor tanaman palawija, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.

3.2 Saran

Proposal yang berjudul “Analisis Potret Ekonomi Publik Indonesia Meliputi Tanaman Palawija, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan” dapat kami selesaikan dan kami menyadari proposal ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami harap proposal ini dapat bermanfaat dan berguna sebagai pelengkap belajar. Kami juga menginginkan kritik dan saran demi hasil proposal yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahiri, D. (2022). Analisis Nilai Tambah Komoditas Unggulan Subsektor Perkebunan. *Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 7(1), 114–133. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v7i1.122>
- Jawame, I., Porajouw, O., & Rumagit, G. A. J. (2021). Peran Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Di Kabupaten Mimika Provinsi Papua. *Jurnal Ilmiah Agri-SosioEkonomi Unsrat*, 17(3), 859–866. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/gkapantow2,+Jurnal+Isak+Jawame-Eru.pdf>
- Rosmika, N. (2020). Pengaruh Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 7(2), 156–169. <https://doi.org/10.24815/ekapi.v7i2.21117>
- Sari, K. D. A., & Winarno, W. A. (2012). JEAM Vol XI No. 1/2012 1. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, XI(1), 1–19.
- Suhana, S. (2015). Kebijakan Kelautan Dan Perikanan Dan Implikasinya Terhadap Kelestarian Sumberdaya Ikan Dan Ekonomi Perikanan Indonesia. *RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN: Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan*, 2(1), 70. <https://doi.org/10.20957/jkebijakan.v2i1.10397>
- Zendrato, D. T., Rustiadi, E., & Rusdiana, O. (2020). Peranan Subsektor Kehutanan dalam Pembangunan Wilayah Provinsi Jawa Barat: Pendekatan Input-Output dan Pewilayahan. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.1.1-13>